

## 2BAB - III

### RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

#### 3.1 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

##### 3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Capaian Tahun 2014

Melemahnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa, mulai dirasakan berimbas ke Indonesia, dengan turunnya ekspor. Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2013 masih bisa mencapai 5,78% (YoY) dan merupakan salah satu yang tertinggi di Asia setelah China yang tumbuh sebesar 7,6% (YoY), namun lebih rendah dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan tahun 2013 sebesar 6,3%. Pertumbuhan ini juga lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang mampu mencapai 6,26%. Adapun nilai PDB Indonesia atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2013 mencapai IDR 2.770,9 triliun, naik sebesar IDR 151,4 triliun dibandingkan tahun 2012 yang mencapai IDR 2.618,9 triliun. Demikian pula dengan nilai PDB atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai IDR. 9.084,0 triliun, naik sebesar IDR 854,6 triliun dibandingkan tahun 2012 yang mencapai IDR.8.229,4.

Di tengah pelemahan kondisi ekonomi global yang masih berlanjut sebagaimana yang dijelaskan diatas, perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2013 masih tumbuh cukup kuat, terutama ditopang oleh permintaan konsumsi rumah tangga. Walaupun belum diikuti inflasi yang terkendali pada level yang sebagaimana yang diharapkan, dimana inflasi mencapai kisaran double digit di angka 10,18%, akan tetapi kedepan hal ini akan terus diupayakan terkendali dengan dukungan penuh TPID dan Kabupaten/Kota dengan tidak melupakan peranan besar dunia usaha. Kuatnya perekonomian Sumatera Utara di tengah lemahnya ekonomi global menyebabkan meningkatnya defisit transaksi berjalan selama tahun 2013 pada tingkat nasional dimana secara kumulatif telah mengalami defisit transaksi berjalan sebesar -4,06%, dan syukur pada tingkat regional Provinsi Sumatera Utara kondisi defisit transaksi berjalan tidak terjadi.

Berdasarkan kondisi perekonomian makro Tahun 2013, Provinsi Sumatera Utara masih tumbuh relatif baik, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,01%, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp. 403,93 triliun, PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 sebesar Rp. 142,54 triliun, PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 30,0 juta atau jika di kurs tengah dollar rata-rata tahun 2013 10.428, maka konversi PDRB/kapita masyarakat Sumatera Utara adalah 2.876,82 dollar AS/kapita, memang belum sebaik capaian nasional yang mencapai 3.499,9 dollar AS/Kapita. Adapun sumbangan PDRB Sumatera Utara terhadap PDB Nasional di tahun 2013 adalah sebesar 5,35% meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2012 yang menyumbang sebesar 5,30% dan menempati urutan ke-7 sebagai penyumbang PDB Indonesia. Adapun secara rinci disampaikan 10 Provinsi Penyumbang PDB terbesar Indonesia di Tahun 2012 dan 2013.

Tabel 3.1.  
Provinsi penyumbang PDB terbesar di Indonesia (2012-2013)

NO	PROVINSI	KONTRIBUSI PDRB TERHADAP PDB		SHIFT
		2012	2013	
1	DKI Jakarta	16.80	16.72	-0.08
2	Jawa Timur	14.90	14.87	-0.03
3	Jawa Barat	13.90	14.17	0.27
4	Jawa Tengah	7.90	7.96	0.06
5	Kalimantan Timur	5.90	5.42	-0.48
6	Riau	7.10	6.96	-0.14
7	Sumatera Utara	5.30	5.35	0.05
8	banten	3.20	3.22	0.02
9	Sumatera Selatan	3.10	3.06	-0.04
10	Sulawesi Selatan	2.40	2.39	-0.01

Jika dilihat dari struktur ekonomi pembentuk PDRB Sumatera Utara pada tahun 2013 sektor industri pengolahan masih menjadi menyumbang terbesar yakni sebesar 21,58%, diikuti sektor pertanian sebesar 21,32%, Perdagangan, Hotel, dan Restoran mencapai 19,29%, Jasa – jasa 11,51%, Pengangkutan dan Komunikasi mencapai 9,55%, Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 7,68%, Bangunan sebesar 6,92%, Pertambangan dan Penggalian 1,30%, Listrik, Gas, dan Air Bersih mencapai 0,85%.

Bila dilihat dari struktur pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih merupakan penyumbang terbesar bagi pembentuk PDRB Sumatera Utara, dimana pada tahun 2013 memberikan sumbangan sebesar 59,74%, meningkat bila dibandingkan kondisi tahun 2012 yang memberikan sumbangan sebesar 59,18%, selain itu dari sisi Pembentukan Modal Tetap Bruto (investasi ) terjadi peningkatan kontribusi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2012 PMTB memberikan sumbangan bagi PDRB sebesar 21,00% dan di tahun 2013 menjadi 21,57%, di urutan ketiga penyumbang PDRB adalah konsumsi pemerintah yang memberikan kontribusi sebesar 9,86%, walaupun hal ini menurun bila dibandingkan dengan posisi yang sama di tahun 2012 yang memberikan kontribusi sebesar 10,03%, dan kemudian diurutkan selanjutnya adalah perdagangan luar negeri yang memberikan sumbangan di tahun 2013 sebesar 8,00% menurun bila dibandingkan dengan 2012 yang memberikan sumbangan sebesar 9,20%, hal ini sebagai dampak dari pelemahan ekonomi global yang berimplikasi pada penurunan kinerja ekspor Sumatera Utara.

Dari sisi perdagangan luar negeri, capaian neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara juga masih surplus sebesar 4,49 milyar US\$ di tahun 2013 dengan rincian volume Ekspor sebesar 9,27 juta/Ton, dengan nilai sebesar US\$ 9,60 milyar, kondisi tidak lebih baik dari capaian tahun 2012 dimana nilai ekspor Sumatera Utara mencapai US\$ 10,39 miliar, dengan volume ekspor sebesar 8,69 juta ton, adapun Volume Impor di tahun 2013 sebesar 6,95 juta/ton dengan nilai sebesar US\$ 5,11 milyar, sehingga dapat dikatakan bahwa impor di tahun 2013 meningkat dari sisi volume walaupun dari sisi nilai berkurang, sehingga hal ini harus diantisipasi kedepan terlebih dengan akan dibukanya kran perdagangan bebas ASEAN melalui pemberlakuan ASEAN Economy Community (AEC) di tahun 2015.

Tingkat pencapaian realisasi investasi di Provinsi Sumatera Utara baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2013 juga masih menunjukkan kondisi yang lebih baik bila dibandingkan tahun 2012, dimana untuk PMA dari izin prinsip/surat persetujuan (SP) PMA sebesar 58 proyek dengan nilai investasi 868.881,80 terealisasi investasi dengan total proyek 252 proyek dengan nilai US\$ 887.452 ribu, meningkat dibandingkan realisasi investasi PMA di tahun 2012 yang mencapai US\$ 645.300 ribu, dengan tenaga kerja yang terserap untuk tahun 2013 sebanyak 29.186 meningkat sebesar 57,62% dibandingkan serapan tenaga kerja tahun 2012 yang mencapai 18.517 orang, sementara untuk PMDN di tahun 2013 realisasinya lebih baik dari 2012 dimana nilai realisasi mencapai Rp. 5,07 triliun dengan serapan tenaga kerja sebanyak 18.171 orang dan ini meningkat bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2012 dimana realisasi investasi sebesar Rp. 2,97 triliun dan serapan tenaga kerja sebanyak 8.575 orang.

Pencapaian tingkat inflasi Sumatera Utara Tahun 2013 mencapai 10,18%, tingkat inflasi ini lebih buruk dari capaian nasional yang mencatat nilai inflasinya sebesar 8,38%. Adapun capaian nilai inflasi kumulatif Januari – Desember 2013, disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Kondisi Inflasi Sumatera Utara dan 4 Kota tahun 2013

No.	Kota	IHK Desember 2012	IHK November 2013	IHK Desember 2013	Inflasi Desember 2013	Inflasi Kumulatif 2013	Inflasi Year on Year
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Medan	135,15	148,89	148,79	-0,07	10,09	10,09
2.	Pematangsiantar	139,13	154,90	155,85	0,61	12,02	12,02
3.	Sibolga	140,64	153,66	154,82	0,75	10,08	10,08
4.	Padangsidempuan	137,02	148,40	147,74	-0,44	7,82	7,82
5.	Sumatera Utara	135,83	149,63	149,66	0,02	10,18	10,18

Sementara kondisi Nilai Tukar Petani ( NTP ) pada tahun 2013 (Desember) telah mencapai sebesar 99,61 kondisi ini meningkat dari capaian tahun 2012 (Desember) yang mencapai 98,55, akan tetapi belum mencapai 100.

### 3.1.2 Prospek dan tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015

Stabilitas makro ekonomi dan moneter yang mengalami pelemahan dalam tahun 2013, diperkirakan masih terus berlanjut pada tahun 2014. Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 akan melambat pada angka 5,3 persen. Prediksi tersebut lebih rendah dibanding perkiraan Dana Moneter Internasional (IMF) yang bisa berkisar 5-5,5 persen. Prediksi pertumbuhan tahun depan versi Bank Dunia itu turun dari tahun ini sebesar 5,6 persen.

Sementara pemerintah memperkirakan tahun depan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,5 persen dengan defisit APBN sebesar 1,69 persen dari PDB. Pemerintah beralasan bahwa perlambatan pertumbuhan dibutuhkan untuk mengurangi defisit transaksi berjalan melalui pengetatan fiskal dan moneter. Pengetatan moneter dan fiskal dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia sebagai upaya untuk memberikan fondasi yang kuat bagi perekonomian.

Defisit transaksi berjalan yang meningkat akhir akhir ini, dituding sebagai akibat masalah struktural perekonomian yang kemudian mendorong rupiah tercatat sebagai kurs negara Asia terlemah tahun ini, anjlok hingga 20 persen terhadap dolar AS.

Guna mengurangi tekanan defisit transaksi berjalan (*balance of payment*), Pemerintah dan Bank Indonesia mengambil kebijakan fiskal dan moneter ketat pada tahun 2013 dan 2014. Sejumlah upaya dilakukan untuk menahan defisit seperti kenaikan BI rate menjadi 7,5 persen. BI rate sudah naik 175 basis poin atau 1,75 persen sejak Juni-November 2013. Padahal sejak Februari 2012, BI rate tetap bertengger di 5,75 persen.

Pertumbuhan konsumsi domestik yang selama ini menjadi penopang utama juga akan melemah. Melambatnya investasi bisa dimaklumi seiring dengan kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan Bank Indonesia guna menekan gejolak nilai tukar dan defisit transaksi berjalan.

Meski demikian, Indonesia masih bisa berpeluang mendorong investasi melalui masuknya investasi asing langsung (*foreign direct investment*). Fokus investasi jangka panjang ini akan memberikan dampak positif bagi penguatan nilai tukar rupiah, mengurangi defisit dan memacu pertumbuhan. Pemerintah telah menyederhanakan regulasi untuk menarik lebih banyak investasi dengan merevisi Daftar Negatif Investasi. Pada sisi lain, dampak kebijakan stabilisasi moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia, akan mulai berdampak positif pada tahun

depan, dengan menurunnya defisit transaksi berjalan. Ini dikarenakan melemahnya impor dan meningkatnya sektor ekspor

Bank Dunia memprediksi, pada tahun 2014 mendatang defisit neraca berjalan akan menurun dari US\$ 31 miliar atau 3,5 persen dari PDB tahun ini menjadi US\$ 23 miliar atau 2,6 persen dari PDB. Sementara Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan Indonesia tahun depan bakal masih di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)

Defisit transaksi berjalan yang tinggi dan terus berkepanjangan ini telah terjadi sejak kuartal keempat tahun 2011. Sebelumnya pada sepuluh tahun yang lalu, Indonesia pernah dua kali mengalami defisit tapi hanya pada satu kuartal di 2005 dan tiga kuartal di 2008 dengan nilai US\$ 1 - 2 miliar. Sekarang defisitnya jauh lebih tinggi sebesar US\$ 9,9 miliar pada kuartal ketiga tahun ini.

Sesungguhnya, defisit transaksi berjalan tak perlu ditakuti berlebihan, asalkan arus modal asing masuk bisa membiayai defisit. Tentu saja kita berharap investasi yang masuk adalah dalam bentuk investasi asing langsung (*foreign direct investment*) karena bermanfaat dalam jangka panjang terutama memperkuat fundamental market dan membuat prospek ekonomi meningkat karena produktivitas domestik akan meningkat. Selain itu, *foreign direct investment*/FDI membiayai 60 persen dari defisit transaksi berjalan, sisanya portfolio

Selain, itu guna memperkuat transaksi berjalan, Indonesia perlu melakukan beberapa penyesuaian dengan mendorong pengembangan industri manufaktur. Hal ini untuk mendorong ekspor produk yang bernilai tambah. Selama ini, daya saing dan ekspor kita masih berfokus pada sumberdaya alam, sementara banyak mengesampingkan industri manufaktur. Akibatnya disaat kondisi harga komoditas di pasar global menurun, perekonomian kita ikut menurun.

Oleh sebab itu, ke depan pemerintah harus segera melakukan reformasi struktural, seperti meningkatkan ekspor dan menekan impor melakukan pendalaman industri manufaktur serta mendorong pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*) agar sektor keuangan semakin likuid. Sejumlah kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah di antaranya menetapkan sejumlah kebijakan fiskal dan insentif di sektor keuangan dalam mendorong investasi

Selain tantangan domestik, tantangan global juga bisa meredam laju pertumbuhan ekonomi domestik. Salah satu tantangan perekonomian global tersebut adalah pergeseran lanskap ekonomi global. Negara negara maju yang sebelumnya terpukul, kini sudah mulai menggeliat. Perekonomian Amerika Serikat kini mulai menguat, ekonomi Eropa berpeluang lepas dari krisis, namun sisi lain, ekonomi emerging market justru melambat. Dampaknya adalah memutar balik arah modal portofolio menuju negara maju

Pada triwulan I 2014 secara *years on years* (yoy) pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tumbuh sebesar 5,60%, walaupun belum seperti yang diestimasikan, akan tetapi capaian ini lebih baik dari nasional yang tumbuh sebesar 5,21%. Peningkatan ini didukung oleh pertumbuhan pada semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Sektor Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan yang mencapai 10,50 persen (y-to-y). Sektor lain yang juga mengalami pertumbuhan cukup tinggi terutama Sektor jasa-jasa tumbuh sebesar 7,50 persen. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada Sektor Industri pertanian mengalami pertumbuhan hanya sebesar 2,90 persen.

Berikut ini disajikan kondisi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara Triwulan I 2014 menurut lapangan usaha.

Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara  
Triwulan I Tahun 2014 menurut lapangan usaha

Lapangan Usaha/Sektor	Triw IV 2013 terhadap Triw III 2013	Triw I 2014 terhadap Triw IV 2013	Triw I 2014 terhadap Triw I 2013	Sumber Pertumbuhan (y-on-y)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	-2,55	6,64	2,90	0,68
2. Pertambangan dan Penggalian	2,98	-0,65	3,53	0,04
3. Industri Pengolahan	1,95	-2,04	5,93	1,16
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,69	1,33	5,59	0,04
5. Bangunan	3,51	-2,36	5,89	0,40
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,16	4,32	5,65	1,10
7. Pengangkutan dan Komunikasi	0,17	1,59	5,32	0,56
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-0,35	1,59	10,50	0,85
9. Jasa-jasa	3,53	-1,43	7,50	0,77
<b>PDRB</b>	<b>0,50</b>	<b>1,83</b>	<b>5,60</b>	<b>5,60</b>

Dari data yang disajikan di atas diperoleh hasil bahwa sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi yang dicapai di triwulan I 2014 berasal dari sektor industri pengolahan yang memberikan andil sebesar 1,16%, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,10%, adapun andil terkecil diperoleh dari sektor listrik, gas dan air bersih yang memberikan sumbangan pertumbuhan sebesar 0,04%.

Sementara itu PDRB Sumatera Utara atas dasar harga berlaku pada triwulan I tahun 2014 mencapai Rp.108,66 triliun, sedangkan berdasarkan atas dasar harga konstan 2000 tercapai sebesar Rp.37,00 triliun. Atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menunjukkan nilai tambah bruto yang terbesar pada triwulan I tahun 2014 adalah Sektor Pertanian dengan nilai sebesar Rp.23,59 triliun, disusul oleh Sektor Industri Pengolahan sebesar Rp. 23,02 triliun, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar Rp. 21,08 triliun, Sektor Jasa-jasa sebesar Rp. 12,45 triliun, sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar Rp.10,42 triliun, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan sebesar Rp.8,39 triliun, dan Sektor Bangunan sebesar Rp7,41 triliun. Sektor ekonomi lainnya yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian menghasilkan nilai tambah bruto sebesar Rp.1,39triliun, dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih sebesar Rp. 913,26 miliar.

Berikut ini disajikan data PDRB Sumatera Utara triwulan I 2014 dibandingkan dengan triwulan IV 2013

Tabel 3.3. PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Sektor  
(Milyar rupiah)

Lapangan Usaha/Sektor	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I
	2013	2014	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1. Pertanian	21 932,94	23 587,19	7 909,29	8 434,61
2. Pertambangan dan Penggalian	1 390,72	1 389,75	414,06	411,38
3. Industri Pengolahan	23 336,69	23 017,61	7 425,10	7 273,77
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	897,41	913,26	257,97	261,39
5. Bangunan	7 581,32	7 408,86	2 609,00	2 547,32
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	20 174,44	21 076,82	6 918,70	7 217,76
7. Pengangkutan dan Komunikasi	10 121,37	10 421,56	3 787,97	3 848,24
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	8 241,29	8 393,24	3 097,51	3 146,78
9. Jasa-jasa	12 607,09	12 453,05	3 923,95	3 867,91
<b>PDRB</b>	<b>106 283,30</b>	<b>108 661,35</b>	<b>36 343,55</b>	<b>37 009,17</b>

Pada triwulan I tahun 2014, Sektor Pertanian masih mendominasi struktur PDRB Sumatera Utara yakni sebesar 21,71 persen, diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan yaitu 21,18 persen, Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran 19,40 persen, sektor jasa-jasa 11,46 persen, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi 9,59 persen, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 7,71 persen, Sektor Bangunan 6,82 persen, Sektor Pertambangan dan Penggalian 1,28 persen dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih 0,84 persen. Adapun struktur PDRB Sumut triwulan I 2014 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3. Struktur PDRB Sumatera Utara Triwulan – I Tahun 2014**

Lapangan Usaha/Sektor	Struktur	
	Triwulan IV 2013	Triwulan I 2014
[1]	[2]	[3]
1. Pertanian	20,64	21,71
2. Pertambangan dan Penggalian	1,31	1,28
3. Industri Pengolahan	21,96	21,18
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,84	0,84
5. Bangunan	7,13	6,82
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	18,98	19,40
7. Pengangkutan dan Komunikasi	9,52	9,59
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,75	7,72
9. Jasa-jasa	11,86	11,46
<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Perekonomian Indonesia kedepan diperkirakan akan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi di tahun 2014 diperkirakan dapat mencapai kisaran 6,7-7,2 dan di tahun 2015 sebesar 6,9-7,3, hal ini terutama didorong oleh masih kuatnya peran konsumsi dan investasi serta dengan mempertmbangkan perekonomian dunia yang lebih baik. Peningkatan konsumsi tersebut antara lain terkait dengan persiapan dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2014. Secara sektoral, pertumbuhan perekonomian masih akan didorong oleh kinerja sektor industri pengolahan, sector perdagangan, hotel dan restoran serta sektor transportasi dan komunikasi.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan begitu pula dengan Sumatera Utara terjadi seiring dengan masih kuatnya permintaan domestik dan kondisi eksternal yang tetap baik, permintaan domestik khusus untuk Sumatera Utara masih mendominasi dari struktur PDRB, akan tetapi perlahan telah terjadi pergeseran dimana investasi (PMTB) telah mulai meningkatkan kontribusinya dalam pembentukan PDRB dimana pada tahun 2013 PMTB telah menjadi penyumbang kedua terbesar dalam struktur PDRB Sumatera Utara yang mencapai 21,57%, sementara di tahun 2012 hanya mencapai 21,00%.

Khusus untuk sasaran Sumatera Utara sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 untuk tahun 2015 sebagaimana hasil analisis perekonomian global dan nasional yang akan berimplikasi kepada ekonomi Sumatera Utara ditargetkan laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara adalah 6,20%, tentunya target ini jauh lebih realitis dari sasaran yang ingin dicapai nasional, hal ini akan dapat tercapai terlebih lagi dengan semakin giatnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperbaiki fasilitas infrastruktur ditambah lagi dengan berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015, maka fasilitas pendukung untuk peningkatan daya saing harus segera dipersiapkan.

Peran investasi dalam pertumbuhan ekonomi diperkirakan juga akan semakin meningkat, hal ini didorong berbagai faktor positif seperti potensi pencapaian *investment grade* yang semakin membaik serta perbaikan iklim investasi dan birokrasi, khususnya dengan telah dibentuknya

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan batas waktu pemberian izin investasi (doing business) yang semakin dipersingkat prosesnya.

Dari sisi eksternal, ekspor diperkirakan tumbuh kuat memenuhi permintaan di negara-negara partner dagang, khususnya untuk komoditi unggulan Sumatera Utara seperti kelapa sawit dan karet dimana direncanakan bahwa pada tahun 2015 KEK Sei Mangkei telah dapat beroperasi.

Untuk tahun 2014 dan 2015 berdasarkan PDRB lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama akan didukung oleh sektor industri pengolahan, Sektor Pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor pengangkutan dan komunikasi.

Sementara dari sisi investasi, prospek investasi juga akan cerah, hal ini didorong oleh berbagai faktor antara lain stabilitas makroekonomi yang diperkirakan tetap terjaga serta potensi pasar di Indonesia begitu pula dengan Sumatera Utara karena besarnya jumlah populasi dibanding daerah Provinsi lainnya di luar Jawa.

Volume perdagangan luar negeri khususnya ekspor juga diperkirakan akan tumbuh diatas 6%, bahkan untuk pasar negara-negara berkembang lebih besar dari 6%, sementara untuk negara maju diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,7%, selain faktor permintaan ekspor Sumatera Utara tahun 2014 dan 2015 juga tumbuh kuat dengan dorongan dari trend kenaikan harga komoditas, dengan kuatnya permintaan domestik dan tingginya pertumbuhan ekspor juga akan mendorong impor barang dan jasa yang diperkirakan akan tumbuh sekitar 10%-12% pada tahun 2014 dan 2015. Dengan demikian kinerja ekspor yang tumbuh kuat juga akan menyebabkan pertumbuhan impor pada trend yang sama.

Adapun untuk besaran laju pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi ADHK secara lengkap disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3.4.** Besaran Laju Pertumbuhan Ekonomi Dari Sisi Produksi ADHK

Komponen Produksi		Laju Pertumbuhan		Kontribusi	
		2014	2015	2014	2015
1	Pertanian	5.78	5.00	22.37	22.1
2	Pertambangan dan Penggalian	8.2	7.2	1.15	1.16
3	Industri Pengolahan	15.05	6.96	21.75	21.89
4	Litrik, gas dan air bersih	16.85	4.92	0.78	0.77
5	Bangunan	5.91	6.28	6.99	7.01
6	Perdagangan, Hotel dan retauran	4.19	7.13	18.85	19.00
7	Pengangkutan dan Komunikasi	2.12	5.96	10.06	10.03
8	Kuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan	0.62	6.41	8.00	8.01
9	Jasa-jasa	1.81	6.07	10.05	10.03

Sumber : BPS (Data diolah Bappedasu)

Perkembangan sektor pertanian pada tahun 2014 dan 2015 masih akan diwarnai dengan fenomena anomali cuaca yang diperkirakan akan dapat mempengaruhi produksi dan produktifitas sektor pertanian, sejauh ini anomali cuaca sedang dicarikan jalan keluarnya khususnya untuk komoditas padi dengan menciptakan varietas baru yang tahan akan curah hujan tinggi dan hama penyakit, penyediaan fasilitas infrastruktur pertanian seperti perbaikan irigasi dan pembangunan beberapa bendungan maupun embung di daerah strategis tanaman pangan akan tetap menjadi perhatian khusus baik Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Terkait dengan rencana Pemerintah Daerah Sumatera Utara untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah melalui pelaksanaan program MP3EI khususnya peningkatan peran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, maka ketersediaan pasokan energi listrik dan gas mutlak terpenuhi, diantaranya dengan giat mengundang investor untuk membangun power



plant pipanisasi gas maupun pembangunan *Floating Storage Regasification Unit* (FSRU) dan untuk ketersediaan energi listrik antara lain dengan mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan di Sumatera Utara.

Dengan prospek perekonomian sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka diharapkan sasaran-sasaran makro ekonomi Sumatera Utara akan tetap dapat tercapai untuk peningkatan pembangunan Sumatera Utara, akan tetapi berbagai tantangan dalam mewujudkan sasaran-sasaran makro ekonomi harus diantisipasi, adapun beberapa tantangan tersebut antara lain :

1. Kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang akan terus mengupayakan pemulihan ekonomi domestiknya dengan penerapan kebijakan seperti tapering-off dan quantitative easing
2. Kekhawatiran terhadap pemulihan ekonomi global karena ketidakjelasan penanganan krisis ekonomi di negara-negara Eropa dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang akan mendorong kenaikan komoditas pangan.
3. Sumatera Utara masih tergolong daerah rawan bencana baik banjir, longsor, gunung berapi khususnya di beberapa daerah yang justru menjadi sentra produksi pangan seperti Karo, Mandailing Natal, Langkat, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Asahan dan Kabupaten lainnya.
4. Harga minyak dunia yang kecenderungannya juga akan semakin tinggi, dengan berbagai faktor penyebab, diantaranya kebijakan pemerintah yang akan menurunkan subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) dan energi listrik serta energi gas, hal ini akan mendorong peningkatan biaya produksi yang berimbas pada tidak kompetitifnya produk-produk Indonesia dan Sumatera Utara khususnya.
5. Potensi tekanan inflasi sebagai dampak kebijakan Pemerintah di bidang harga (*administrated price*) dan adanya kemungkinan dari sisi volatile food, sebagai dampak gejolak harga pangan dunia
6. Kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan dan perlu ditingkatkannya belanja pemerintah untuk keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan, jembatan, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi dan lain-lain, terlebih lagi dengan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, kawasan industri lainnya, Kota baru yang akan sangat membutuhkan fasilitas infrastruktur yang lebih baik lagi agar investor berkeinginan berinvestasi di daerah Sumatera Utara.
7. Masalah pengangguran dan kemiskinan serta pemerataan pembangunan (disparitas pendapatan perkapita) masih menjadi masalah ekonomi utama yang sampai saat ini belum bisa diatasi, terlebih lagi banyaknya yang meragukan jumlah angka pengangguran dan kemiskinan serta standar yang dipergunakan untuk pengukurannya.

## **3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan umum pendapatan daerah, pada dasarnya berkaitan dengan kondisi perekonomian Sumatera Utara yang diharapkan antara lain :

- Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2015 diasumsikan sebesar 6,20 %, Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.501,47 triliun, sementara Atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp.

160,87 triliun dan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) antara 3,00% - 4,00%. Tingkat inflasi diestimasikan sebesar 4,25%.

- Nilai Ekspor ditargetkan pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 10,75 milyar US\$ meningkat dari target tahun 2014 yang sebesar Rp. 10,20 milyar US\$; demikian halnya dengan nilai impor tahun 2015 diperkirakan mencapai 6,02 milyar US\$ meningkat dari target tahun 2014 sebesar 5,55 milyar US\$ hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian dunia khususnya Indonesia telah mengalami perbaikan, dimana sebelumnya mengalami krisis di belahan Eropa, Amerika Serikat dan berimbas pada China dan Asia umumnya, termasuk Indonesia dan Sumatera Utara khususnya.
- Penduduk miskin yang ditargetkan turun menjadi sebesar 9,50%.
- Tingkat pengangguran terbuka yang ditargetkan turun menjadi 4,95% pada tahun 2015, lebih baik dibandingkan dengan target tahun 2014 yang diperkirakan sebesar 10,08%.

Adapun untuk secara garis besarnya berikut disampaikan realisasi dan perkiraan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara dalam tabel :

Tabel 3.5. Tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 s.d tahun 2016

Kod Rek	URAIAN	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2012	Realisasi APBD Tahun 2013	Tahun Berjalan 2014	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2015	Proyeksi/Target pada Tahun 2016
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
1.1	Pendapatan asli daerah	4,050,763,903,338	4,092,721,956,825	4,944,501,838,799	5,323,375,364,003	5,607,022,055,279
1.1.1	Pajak daerah	3,636,072,872,638	3,685,437,787,973	4,533,946,179,895	4,859,019,336,086	5,126,265,399,571
1.1.2	Retribusi daerah	33,487,109,273	66,938,011,717	46,975,728,400	19,236,527,917	21,160,180,709
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	263,935,032,838	229,195,003,023	242,514,468,127	259,300,000,000	264,486,000,000
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	117,268,888,589	111,151,154,112	121,065,462,377	185,819,500,000	195,110,475,000
1.2	Dana perimbangan	1,605,181,559,563	1,710,524,658,070	1,906,486,133,424	1,890,999,251,461	2,067,358,480,839
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	460,163,932,563	432,255,806,070	477,716,007,424	463,366,975,461	481,901,654,479
1.2.2	Dana alokasi umum	1,103,389,237,000	1,223,445,404,000	1,349,132,276,000	1,349,132,276,000	1,497,536,826,360
1.2.3	Dana alokasi khusus	41,628,390,000	54,823,448,000	79,637,850,000	78,500,000,000	87,920,000,000
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	1,544,550,841,771	1,717,377,298,800	1,637,655,856,800	1,658,444,417,800	1,648,000,000,000
1.3.1	Dana Otonomi Khusus	14,926,784,000	19,360,721,000	-	-	-
1.3.2	Dana Penyesuaian	1,504,044,905,250	1,619,932,881,000	1,599,572,160,000	1,600,000,000,000	1,608,000,000,000
1.3.3	Hibah	25,579,152,521	78,083,696,800	38,083,696,800	58,444,417,800	40,000,000,000
1.3.4	Dana darurat	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	-	-	-	-	-
1.3.6	lainnya	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)</b>	<b>7,200,496,304,672</b>	<b>7,520,623,913,695</b>	<b>8,488,643,829,023</b>	<b>8,872,819,033,264</b>	<b>9,322,380,536,119</b>

Ketahanan fiskal Daerah akan terus ditingkatkan. Perkiraan Penerimaan Daerah Tahun 2014 termasuk Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 8.488.643.829.023,-, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 4.944.501.838.799,-. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.906.486.133.424,- serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp.1.637.655.856.800,-.

Sedangkan pada tahun 2015 estimasi penerimaan sektor Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara akan diprediksi meningkat diperkirakan sebesar 4,33%, antara lain dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 7,66% atau Rp. 5.323.375.364.003,- Dana Perimbangan diperkirakan akan menurun sebesar -0,81% yakni menjadi Rp. 1.890.999.251.461,-, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah diperkirakan akan meningkat sebesar 1,27% menjadi Rp. 1.58.444.417.800,- penerimaan ini belum termasuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014.

Dari komponen penerimaan PAD diharapkan di tahun 2015 adanya peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya, antara lain dari obyek pungutan pajak daerah sebesar Rp. 4.859.019.336.086,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 19.236.527.917,-, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 259.300.000.000,- sedangkan penerimaan lainnya diharapkan bersumber dari deposito yang pelaksanaan dan besarnya masih belum dapat diprediksi, demikian juga bagi hasil perkebunan (pengusulan bagi hasilnya terus akan menjadi prioritas daerah) dan bagi hasil dari laba yang dikelola sebagai hasil operasional BUMN seperti PT. Angkasa Pura II dan PT. Pelindo sampai saat ini masih dalam proses pembahasan oleh Pemerintah.

Selain itu, penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) diharapkan akan minimal sama dari tahun 2014 yang sebesar Rp.1.349.132.276.000,- hal kontraksi akan berbeda dengan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak yang akan diestimasi menurun, sebagai akibat realisasinya di tahun sebelumnya tidak tercapai, diperkirakan akan menurun sekitar -3,00% menjadi Rp. 463.366.975.461,-, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga diperkirakan menurun menjadi sebesar Rp. 78.500.000.000,-. Turun dari rencana tahun anggaran 2014. Dengan demikian kapasitas sumber penerimaan untuk anggaran Pendapatan Daerah diperkirakan pada tahun 2015 akan mencapai Rp. 8,87 triliun.

### **3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Tahun 2015, Pemerintah Daerah berupaya menetapkan target capaian baik dalam konteks daerah, satuan kerja, dan kegiatan sejalan dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Selain itu diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung, dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Daerah dikelompokkan menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan kelompok Belanja Langsung. Adapun kebijakan umum dalam mengalokasikan Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai; dalam rangka mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD telah diperhitungkan akses yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan); penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai dan telah memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD rata-rata sebesar 10%; dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, akan dialokasikan tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; biaya pemungutan sebagai bentuk pemberian insentif sejalan dengan kinerja organisasi dalam pencapaian target yang ditetapkan yang besarnya 3% dari target penerimaan pajak daerah; Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya penunjang operasional mempedomani ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Belanja Hibah; pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti KPUD dan Bawaslu), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; penentuan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah; dalam pelaksanaan belanja hibah kepada Pemerintah (instansi vertikal) akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Anggaran setelah tahun anggaran berakhir; selanjutnya bantuan keuangan kepada partai politik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
3. Bantuan Sosial; dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan dan guna memelihara kesejahteraan masyarakat dalam skala tertentu, Pemerintah Daerah akan memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat, yang dilakukan secara selektif, tidak mengikat dan diupayakan dalam penetapan besaran bantuannya sejalan dengan jiwa Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dalam arti jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung. Pemberian bantuan sosial didasarkan kriteria yang jelas dengan memperhatikan asas keadilan, transparan dan memprioritaskan kepentingan masyarakat luas, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Belanja Bagi Hasil; dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota disesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota akan ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.
5. Belanja Bantuan Keuangan; dalam menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, dan pengalokasiannya dalam rangka mendukung prioritas pembangunan provinsi diantaranya pendidikan dalam upaya peningkatan wajib belajar 12 tahun dan ketersediaan alokasi 20% belanja pendidikan, kesehatan dalam upaya penyediaan aksesibilitas kesehatan, pertanian dalam upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan, infrastruktur dalam upaya mendukung pembangunan sarana prasarana jalan menuju pusat-pusat produksi pertanian dan kawasan industri, kawasan cepat tumbuh serta sepanjang jalan provinsi dan aksesibilitas menuju daerah objek wisata, serta pengentasan dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
6. Belanja Tidak Terduga; pengalokasian anggaran belanja tidak terduga dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2015; sedangkan penggunaan

belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, yaitu untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari mata anggaran belanja tidak terduga kepada belanja langsung maupun tidak langsung sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan.

Sedangkan kebijakan umum dalam mengalokasikan Belanja Langsung antara lain meliputi :

1. Penganggaran belanja langsung untuk setiap kegiatan, terlebih dahulu dilakukan analisis beban kerja dan kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, untuk menghindari adanya pemborosan;
2. Terhadap kegiatan pembangunan fisik, proporsi belanja modal lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa.
3. Belanja Pegawai; penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi sesuai dengan tingkat kewajaran dan beban tugas. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan; sedangkan penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.
4. Belanja Barang dan Jasa; penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa; Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2014. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan; Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel; Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya dibatasi; Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
5. Belanja Modal; dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan sesuai kebutuhan dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, selanjutnya dituangkan dalam format tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6. Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara  
Tahun 2012 s.d tahun 2016

NO	Uraian	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2012	Realisasi APBD Tahun 2013	Tahun Berjalan 2014	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2015	Proyeksi /Target pada Tahun 2016
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja pegawai	955,151,592,013	924,490,865,162	1,134,078,626,535	1,270,168,061,719	1,422,588,229,125
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja hibah	1,780,011,250,062	1,833,734,179,660	1,702,570,851,830	1,712,570,851,830	1,712,570,851,830
2.1.5	Belanja bantuan sosial	25,858,294,000	43,718,380,000	1,065,000,000	4,528,538,211	4,528,538,211
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	549,531,769,493	522,121,373,000	1,685,553,895,178	2,010,000,000,000	1,999,125,280,623
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	1,844,619,727,373	1,687,837,008,253	1,175,551,653,502	336,000,000,000	336,000,000,000
2.1.8	Belanja tidak terduga	2,574,957,313	498,100,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000	7,500,000,000
<b>B</b>	<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>5,157,747,590,254</b>	<b>5,510,001,806,075</b>	<b>5,706,320,027,045</b>	<b>5,340,767,451,760</b>	<b>5,482,312,899,789</b>
2.2	Belanja Langsung					
2.2.1	Belanja pegawai	160,000,783,996	167,586,538,020	127,342,162,060	128,000,000,000	190,000,000,000
2.2.2	Belanja barang dan jasa	1,510,939,323,343	1,327,812,338,616	1,279,711,570,686	1,641,649,056,028	1,790,269,773,530
2.2.3	Belanja modal	803,607,597,827	760,722,418,737	1,412,927,194,852	1,762,402,525,475	1,985,000,000,000
<b>C</b>	<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>	<b>2,474,547,705,166</b>	<b>2,256,121,295,373</b>	<b>2,819,980,927,598</b>	<b>3,532,051,581,503</b>	<b>3,965,269,773,530</b>
<b>D</b>	<b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>	<b>7,632,295,295,420</b>	<b>7,766,123,101,448</b>	<b>8,526,300,954,643</b>	<b>8,872,819,033,263</b>	<b>9,447,582,673,319</b>

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran Pembiayaan dibedakan atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya Komponen Penerimaan Pembiayaan terdiri dari atas :

- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA).
- Pencairan dana cadangan.
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Penerimaan pinjaman daerah.
- Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- Penerimaan piutang daerah.

Sedangkan komponen Pengeluaran Pembiayaan mencakup :

- Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- Pembayaran pokok utang; dan
- Pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah

penganggaran belanja yang melebihi pendapatan. Pengaturan tentang kebijakan pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 174 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal (investasi daerah); dan transfer ke rekening dana cadangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu; transfer dari dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan pinjaman daerah.

Untuk kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2015 diperkirakan penerimaan pembiayaan akan diperoleh dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran 2014, yang diperkirakan sebesar Rp. 0,-

Penggunaan dari pembiayaan antara lain sebagaimana ketentuan yang berlaku diprioritaskan untuk menutup defisit anggaran serta penyertaan modal pada beberapa BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, adapun untuk tahun 2015 akan diperhitungkan tidak ada penyertaan modal, selama perda belum ditetapkan.

Adapun secara rinci kondisi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel dibawah ini :



Tabel 3.7. Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2012 s.d tahun 2016

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah				
		Realisasi APBD Tahun 2012	Realisasi APBD Tahun 2013	Tahun Berjalan 2014	Proyeksi /Target pada Tahun Rencana 2015	Proyeksi /Target pada Tahun 2016
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
3.1	Penerimaan pembiayaan					
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	711,836,577,827		37,657,125,620	-	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>711,836,577,827</b>	<b>-</b>	<b>37,657,125,620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2	Pengeluaran pembiayaan					
3.2.1	Pembentukan dana cadangan					
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	256,000,000,000		-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	9,311,996,032		-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah			-	-	-
	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>265,311,996,032</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>446,524,581,795</b>	<b>-</b>	<b>37,657,125,620</b>	<b>-</b>	<b>-</b>